

Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang *inheren* disetiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi merupakan program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan pada strategi terpilih sebagaimana bab terdahulu, maka pada bab ini disajikan uraian kebijakan umum beserta program pembangunan daerah tahun 2011 s/d 2016 Kabupaten Pacitan. Adapun pelaksanaan program pembangunan jangka menengah serta keterkaitannya dengan kebijakan umum dan program pembangunan daerah adalah sebagaimana berikut:

7.1. Kebijakan Umum

Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara strategi yang telah disusun dengan arah kebijakan yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan, maka kebijakan umum Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Untuk Strategi Profesional Birokrasi

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab VI, strategi pertama adalah profesional birokrasi. Dengan adanya profesional birokrasi diharapkan tata kelola pemerintah Kabupaten Pacitan dapat mengelola tata pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Kebijakan umum untuk mendukung tercapainya strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan diklat teknis maupun fungsional serta pemberian hak-hak pegawai sesuai ketentuan;

- b. Perencanaan dan pengendalian SPM;
- c. Pengembangan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

2. Kebijakan Umum Untuk Strategi Akselerasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab VI, strategi kedua adalah akselerasi pengembangan desa dan kelurahan siaga untuk mewujudkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dasar.

Kebijakan umum untuk mendukung tercapainya strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. Peningkatan akses, dan prasarana pelayanan kesehatan; dan
- c. Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau.

3. Kebijakan Umum Untuk Strategi Pengembangan Manajemen Pendidikan Berbasis Prestasi Siswa

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab VI, strategi ketiga adalah pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dengan memperbaiki sistem yang lebih berkualitas, dukungan infrastruktur yang layak dan tenaga pengajar yang kompeten.

Kebijakan umum untuk mendukung tercapainya strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Perluasan dan pemberian kesempatan memperoleh pendidikan yang terjangkau; dan
- c. Peningkatan kualitas pendidikan semua jenjang dengan pendekatan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

4. Kebijakan Umum Untuk Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab VI, strategi keempat adalah pengembangan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan umum untuk mendukung tercapainya strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan ekonomi unggulan daerah;
- b. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan;
- c. Pengembangan koperasi, industri kecil, dan UKM berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG); dan
- d. Pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran hasil-hasil produksi.

5. Kebijakan Umum Untuk Strategi Daya Dukung Infrastruktur Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab VI, strategi kelima adalah daya dukung infrastruktur, karena infrastruktur merupakan dasar bagi perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Infrastruktur yang baik akan memegang peranan penting sebagai penggerak roda mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan umum untuk mendukung tercapainya strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan listrik masuk desa dengan memprioritaskan dusun yang belum ada sambungan listrik;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dasar, sentra perekonomian, pendidikan dan kesehatan; dan
- c. Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur.

6. Kebijakan Umum Untuk Strategi Penguatan Jati Diri Masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab VI, strategi keenam adalah penguatan jati diri masyarakat. Penguatan jati diri masyarakat akan menjadikan penguatan akar budaya dan tatanan sosial kemasyarakatan yang telah tertanam dari generasi sebelumnya, masyarakat yang berbudaya akan menjadikan lingkungan kemasyarakatan di Kabupaten Pacitan damai, beradab dan berprestasi.

Kebijakan umum untuk mendukung tercapainya strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan, kebudayaan, kepemudaan, olah raga dan keagamaan.

7.2. Program Pembangunan Daerah

Setelah dirumuskan kebijakan umum, maka ditentukanlah program pembangunan daerah. Berbagai program prioritas yang telah terpilih melalui beberapa tahap pembahasan pada masing-masing strategi dinamakan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah dibuat di masing-masing strategi untuk menunjukkan alur strategi dan kelogisannya dalam mencapai sasaran terkait.

Program pembangunan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan pada strategi yang telah disusun adalah sebagai berikut:

Tabel.T-VII.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Pacitan

1. Program pembangunan daerah pada **strategi profesional birokrasi**, digambarkan pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya	Pelaksanaan diklat teknis maupun fungsional serta pemberian hak-hak pegawai sesuai ketentuan	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	8,90	14,33	BKD & Kantor Diklat
					% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi	1,16	3,25	BKD & Kantor Diklat
					% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	0,00	0,51	Kantor Diklat
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	% Dokumen kepegawaian yang diselesaikan	90,00	92,39	BKD
2	Tercapainya SPM daerah	Prosentase SPM yang mencapai target	Perencanaan dan pengendalian SPM	Program Penetapan dan Pengendalian SPM	SPM yang diterapkan	13	15	Setda
					% SPM yang mencapai target	31,6	82	Setda
3	Terselenggaranya Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Perencanaan dan pengendalian SPM	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	% puskesmas bersertifikat ISO	0	25	Dinkes
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	% Sarana prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik:			RSUD
					- Ambulan/mobil jenazah	37,5	75	
					- Ruang rawat inap/rawat jalan/penunjang medis/kantor	52,62	68,42	
					- Peralatan pelayanan kesehatan	75,93	85,35	
				Program Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Cost recovery (%)	46,15	≥40 %	RSUD
				Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	% karyawan rumah sakit yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	20,31	26,03	RSUD

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (menit)	10	10	Dinas CKTRK
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan (%) :			Dispendukcapil
					- KTP	67,72	90,64	
					- Kartu Keluarga	83,88	96,5	
					- Akta Kelahiran	60,72	83,5	
					- Akta Kematian	0	55,25	
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	% advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	33,96	37	Badan KBPP
					Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	10	100	Badan KBPP
				Program Keluarga Berencana	Peserta KB aktif (%)	76,25	80,04	Badan KBPP
					Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun (%)	1,61	3,5	Badan KBPP
					Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (%)	79,29	65	Badan KBPP
					Cakupan program usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)	13,26	5	Badan KBPP
					Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (%)	69,7	70	Badan KBPP
					Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) / Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) 1 petugas setiap 2 desa/kel	3,3	2	Badan KBPP
					Prosentase petugas PPKBD per desa (%)	100	100	Badan KBPP

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	0	30	Badan KBPP
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	% panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	50	80	Dinas Sosnakertrans
					% wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	35	60	Dinas Sosnakertrans
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	% Penyandang Masalah Sosial yang mendapat konseling dan pelayanan rehabilitasi sosial	11,40%	74,20%	Dinas Sosnakertrans
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rata-rata ketepatan waktu pemrosesan izin sesuai standar layanan (%)	75	100	BPMPP
					Terimplementasikannya SPIPISE	-	100	BPMPP
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	% pelayanan berstandar internasional (ISO)	0	100	Setda
				Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	% SKPD yang menerapkan e-governmen	41,86%	100,00%	Setda
					Website milik pemerintah daerah	ada	ada	Setda
					Website DPRD Kab. Pacitan	-	ada	Set. DPRD
					% data dan laporan terpublikasi	50	100	DPPKA
4	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)	Opini audit BPK: WTP (wajar tanpa pengecualian)	Pengembangan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan perda/perkada:			Bappeda
					- RPJPD	-	ada	
					- RTRW	ada	ada	
					- RPJMD	ada	ada	
					- RKPD	ada	ada	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Program Perencanaan tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	50	80	Dinas CKTRK
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Ketepatan waktu menyelesaikan LKPJ (hari)	75	75	Setda
					Ketepatan waktu menyelesaikan LPPD (hari)	75	75	Setda
					Ketepatan waktu menyelesaikan EKPPD (hari)	75	75	Setda
					% unit pelayanan yang melaksanakan IKM	75	75	Setda
					Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	100	100	Setda
					% pelayanan berstandar internasional (ISO)	0	100	Setda
					% Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditindak lanjuti	100	100	Inspektorat
				Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	% SKPD yang menerapkan e-governmen	41,86%	100,00%	Setda
					Website milik pemerintah daerah	ada	ada	Setda
					Website DPRD Kab. Pacitan	-	ada	Set. DPRD
					% data dan laporan terpublikasi	50	100	DPPKA
				Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	DPPKA
					% barang daerah yang teregistrasi	100	100	DPPKA
				Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	% sistem dan prosedur pengawasan yang disusun	-	100	Inspektorat
				Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	% Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	-	100	Inspektorat

2. Program pembangunan daerah pada **strategi akselerasi pengembangan desa dan kelurahan siaga**, digambarkan pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya perilaku hidup sehat	Prosentase penduduk yang menggunakan jamban	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	50,4	100	Dinkes
		Prosentase rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa siaga aktif (%)	49,71	84,42	Dinkes
2	Terciptanya lingkungan sehat	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Peningkatan akses, dan prasarana pelayanan kesehatan	Program Pengembangan Perumahan	Rumah layak huni (%)	88,12	94,00	Dinas CKTRK
				Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rumah bersanitasi (%)	76,56	85,21	Dinas CKTRK
				Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Permukiman layak huni (%)	97,40	97,59	Dinas CKTRK
				Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	% hutan kota dan pohon peneduh yang terpelihara	100	100	Kantor LH
		Skor Evaluasi Adipura	Peningkatan akses, dan prasarana pelayanan kesehatan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	% Pengolahan sampah	86,83	30	Kantor LH
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL			Kantor LH
					- AMDAL	6	100	
					- UKL-UPL/SPPL	200	100	
3	Meningkatnya pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	% Ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	65,28	95	Dinkes

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kunjungan puskesmas/visit rate (%)	58,59	70,19	Dinkes
					Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	94,36	100	Dinkes
					Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarkes (RS) di Kab/Kota	100	100	Dinkes
					% penduduk yang memanfaatkan rumah sakit	8,41	9,49	RSUD
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	Dinkes
					Cakupan MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	1,86%	100	Dinkes
				Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	50,29	84,21	Dinkes
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular :			Dinkes
					a. AFP Rate per 100.000 penduduk <15 tahun	6,61	≥ 2	
					b. Penemuan penderita pneumonia balita	22,75	54	
					c. Penemuan pasien baru TB BTA +	18,92	30	
					d. Penderita DBD yang ditangani	100%	100%	
					e. Penemuan penderita diare	20,35%	30	
					Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%	Dinkes
				Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan kunjungan ibu hamil k-4 (%)	87,75	95	Dinkes
					Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	90,92%	80	Dinkes

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98,61%	95	Dinkes
					Cakupan pelayanan nifas	101,10%	95	Dinkes
					Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	108,55%	80	Dinkes
					Cakupan kunjungan bayi	98,92%	95	Dinkes
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan pelayanan anak balita (%)	89,24	90	Dinkes
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	32,13	22	Dinkes
				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	25,38	40	Dinkes
					Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0,83%	2,5	Dinkes
4	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Peningkatan akses, dan prasarana pelayanan kesehatan	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (‰)	0,37	0,43	Dinkes

3. Program pembangunan daerah pada ***strategi pengembangan manajemen pendidikan berbasis prestasi siswa***, digambarkan pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman	Pembangunan sarana prasarana pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	41,2	55,65	Dinas Pendidikan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		permanen di daerah terpencil						
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) :			Dinas Pendidikan
					- SD/MI	103,1	103,1	
					- SMP/MTs	96,5	98	
				Program Pendidikan Menengah	APK SMA/SMK/MA/Paket C	67,15	70,7	Dinas Pendidikan
2	Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau	Angka rata-rata lama sekolah	Perluasan dan pemberian kesempatan memperoleh pendidikan terjangkau	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) :			Dinas Pendidikan
					- SD/MI	98,17	99	
					- SMP/MTs	81,58	85,01	
				Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/Paket C	53,05	60	Dinas Pendidikan
3	Meningkatnya pelayanan pendidikan	Angka Melek Huruf	Peningkatan kualitas pendidikan semua jenjang dengan pendekatan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf (%)	91,58	91,65	Dinas Pendidikan
					Cakupan masyarakat yang terlayani pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan masyarakat	0,332	0,456	Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Luar Biasa	Cakupan anak berkebutuhan khusus yang mendapat pelayanan pendidikan (%)	0	50	Dinas Pendidikan
				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan Taman Bacaan Masyarakat	52.498	108.347	Dinas Pendidikan
				Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya perpustakaan di tingkat kab., kec.,desa/kel. bagi masyarakat	39,21	70,1	Kantor Perpus., Arsip dan Dok.
					Tersedianya buku koleksi di tingkat kab., kec.,desa/kel. bagi masyarakat	1,02	2,25	Kantor Perpus., Arsip dan Dok.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Angka Kelulusan	Peningkatan kualitas pendidikan semua jenjang dengan pendekatan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka kelulusan (%) :			Dinas Pendidikan
					- SD/MI	99,98	100	
					- SMP/MTs	99,35	99,93	
					Nilai rata-rata ujian nasional (%)			Dinas Pendidikan
					- SD/MI	6,79	7,35	
					- SMP/MTs	7,18	7,3	
				Program Pendidikan Menengah	Angka kelulusan (%)			Dinas Pendidikan
					- SMA/SMK/MA	98,34	99,91	Dinas Pendidikan
					Nilai rata-rata ujian nasional (%)			
					- SMA/SMK/MA	6,93	7,3	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang bersertifikasi pendidik (%)			Dinas Pendidikan
					- SD/MI	46,13	80	
					- SMP/MTs	38,36	90	
					-SMA/MA/SMK	61,63	90	
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Sekolah yang memiliki akreditasi minimal B (%) :			Dinas Pendidikan
					- SD	49,29	78,33	
					- SMP	81,82	90,91	
					- SMA	90	100	
					- SMK	50,7	65,9	

4. Program pembangunan daerah pada ***strategi pengembangan ekonomi kerakyatan***, digambarkan pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif	Pengembangan ekonomi unggulan daerah	Program perencanaan pembangunan ekonomi	% data dan informasi ekonomi yang dihasilkan	8,62	100	Bappeda
				Program Kelitbangan	% kelitbangan (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan dan pengoperasian) yang dimanfaatkan	78	100	Balitbangtik
				Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Cakupan tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang dipasarkan	43,14	52,94	Distanak
					Nilai pemasaran produk unggulan perkebunan (Rp.000.000)			Dinas Hutbun
					- Kelapa	137.730	658.080	
					- Cengkeh	26.989	744.117	
					- Kopi	5.381	52.789	
					- Nilam	469	12.195	
					- Lada	134	1.275	
					- Kapas	148	620	
					- Kakao	2.606	19.796	
				Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Cakupan produk peternakan unggulan yang dipasarkan	38,46	53,85	Distanak
				Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pengembangan komoditi hutan kayu dan non kayu			Dinas Hutbun
					- Jati (Ha)	17.601,50	18.543,00	
					- Sengon (Ha)	20.004,40	21.428,02	
					- Gmelina (Ha)	1.274,50	2.146,60	
					- Jabon (Ha)	-	1.171,70	
					'- Lebah Madu (setup)	-	700	
					- Tanaman bawah tegakan (Ha)	120	220	
				Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Produksi sektor pertambangan :			Distamben

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					- pertambangan (ton)	1.279.387	3.000.000	
					- air tanah (m3)	429.890	680.279	
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	487.855	3.661.955	Dinas Budparpora
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	% obyek wisata yang layak jual	36,5	46,58	Dinas Budparpora
				Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produksi produk hasil olahan perikanan (ton)	115	151	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Konsumsi ikan (Kg/kap/th)	10,81	14,12	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Luas areal pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar (Ha)	44,779	129,5	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pertumbuhan Industri (%)	1,51	2,5	Dinas Koperindag
2	Ketersediaan pangan daerah	Penguatan cadangan pangan	Peningkatan produksi ketersediaan pangan secara berkelanjutan	Peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita	0	100	Kantor Ketapang
					Penguatan cadangan pangan	0	65	Kantor Ketapang
					Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	0	94,44	Kantor Ketapang
					Stabilitas harga dan pasokan pangan	0	92,53	Kantor Ketapang
					Skor Pola Pangan Harapan:			Kantor Ketapang
					- PPH Konsumsi	72,89	73,96	Kantor Ketapang
					- PPH Ketersediaan	79,8	95	
					Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0	84	
					Penanganan daerah rawan pangan	0	84	Kantor Ketapang
				Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas tanaman pangan per hektar (ku/ha)	84,01	90,61	Distanak
					Produktivitas hasil perkebunan (ton/Ha)			Dinas Hutbun
					- Kelapa	1,327	1,375	
					- Cengkeh	0,112	0,13	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					- Kopi	0,524	0,55	
					- Nilam	7,62	8,262	
					- Lada	0,115	0,127	
					- Kapas	0,194	10,106	
					- Kakao	0,178	0,216	
				Program peningkatan produksi hasil peternakan	produksi hasil peternakan:			Distanak
					- daging (kg)	2.928.731	3.247.446	
					- telur (kg)	392.647	498.000	
					- susu (litr)	125.125	21.600	
				Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (kolam, Keramba, Minapadi) (Kg)	296.354	765.152	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	4.691,80	7.036,88	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing	Prosentase koperasi aktif	Pengembangan koperasi, industri kecil, dan UKM berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG)	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi aktif (%)	84,18	90,74	Dinas Koperindag
		Jumlah UMKM	Pengembangan koperasi, industri kecil, dan UKM berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG)	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan bina UMKM	1,15	1,87	Dinas Koperindag
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan UMKM yang mendapat bantuan modal (%)	0,9	1,72	Dinas Koperindag
				Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru (%)	1	1,6	Dinas Koperindag
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	-	4	BPMPP
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan (unit)	9,979	10,633	Dinas Koperindag

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
4	Pemasaran komoditas daerah	Omset penjualan komoditas unggulan	Pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran hasil-hasil produksi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi peluang PM Kabupaten	-	1	BPMPP
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	-	2	BPMPP
				Program Pengembangan Kemitraan	% kemitraan promosi pariwisata dengan pihak luar/agency	48,78	76,58	Dinas Budparpora
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Omset penjualan komoditas unggulan (milyar)	556	610	Dinas Koperindag
					% pasar daerah dalam kondisi baik	60	80	DPPKA

5. Program pembangunan daerah pada **strategi daya dukung infrastruktur pembangunan daerah**, digambarkan pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian	% jalan dan jembatan dalam kondisi baik: - jalan - jembatan	Peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar, sentra perekonomian, pendidikan dan kesehatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	% jalan dan jembatan yang dibangun :			Dinas Bina Marga dan Pengairan
					- jalan	36,95	40	
					- jembatan	78,21	86	
				Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	% jalan dan jembatan dalam kondisi baik:			Dinas Bina Marga dan Pengairan
					- jalan	49,58	54,5	
					- jembatan	89,84	92,3	
				Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Cakupan panjang jalan dan jembatan yang diinspeksi			Dinas Bina Marga dan Pengairan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					- jalan	-	100	
					- jembatan	-	100	
				Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	% jalan poros desa dan jembatan perdesaaan dalam kondisi baik:			Dinas Bina Marga dan Pengairan
					- jalan poros desa	13,66	18,9	
					- jembatan perdesaaan	41,64	50,7	
					Cakupan layanan infrastruktur perdesaaan:			Dinas CKTRK
					- Pembangunan jalan lingkungan (%)	36,05	41,59	
		Jumlah Terminal Bis/sub terminal	Peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar, sentra perekonomian, pendidikan dan kesehatan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	% prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	62%	82%	Dishubkominfo
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	% pemenuhan sarana prasarana perhubungan	13%	92%	Dishubkominfo
		Jumlah rumah tangga pengguna listrik	Peningkatan listrik masuk desa dengan memprioritaskan desa yang belum ada sambungan listrik	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	% Rumah tangga pengguna listrik	60,13	73,49	Distamben
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata-rata kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LPMD)	0,42	5,08	Bappemas dan Pemdes
					% Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan	14,6	57,59	Bappemas dan Pemdes
				Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	16,56	18,77	Bappemas dan Pemdes

6. Program pembangunan daerah pada ***strategi penguatan jati diri masyarakat***, digambarkan pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai	Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya dan agama	Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan keagamaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan fasilitasi seni	95	70	Dinas Budparpora
					Cakupan gelar seni	100	100	Dinas Budparpora
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan tempat	0	100	Dinas Budparpora
				Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan kajian seni	13	100	Dinas Budparpora
					Cakupan SDM kesenian	0	25	
		Jumlah kegiatan kepemudaan	Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan keagamaan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	% organisasi kepemudaan yang dibina	73,68	100	Dinas Budparpora
		Jumlah kegiatan olahraga	Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan keagamaan	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	% jenis olah raga yang berprestasi	30	60	Dinas Budparpora
					% olah raga yang berkembang di masyarakat	40	50	Dinas Budparpora
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	% sarana dan prasarana olah raga yang dibangun	25	70	Dinas Budparpora
		Angka kriminalitas	Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan keagamaan	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Nara Pidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Cakupan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dibina	-	100	Dinas Sosnakertrans

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	% desa mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	20	100	Bakesbangpol
				Program pendidikan politik masyarakat	% Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik	20	100	Bakesbangpol
				Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1	2	SATPOL PP
				Program pemeliharaan kentrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	70%	95%	SATPOL PP
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0,93	0,93	SATPOL PP
				Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	% Penanganan penyakit masyarakat (PEKAT)	0	90%	SATPOL PP
2	Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Skala Kab/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan keagamaan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	% PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	15	80	Dinas Sosnakertrans
					% PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	15	80	Dinas Sosnakertrans
					% penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	15	40	Dinas Sosnakertrans
		Prosentase kader bina ketahanan keluarga	Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan, kebudayaan,	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	% penyandang cacat yang mendapat pelayanan dan pelatihan ketrampilan	7,6	67,63%	Dinas Sosnakertrans

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KONDISI AWAL 2010	KONDISI AKHIR 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			kepemudaan, olahraga dan keagamaan					
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan			Dinas Sosnakertrans
					- Berbasis Kompetensi	20	75	
					- Berbasis Masyarakat	30	60	
					- Kewirausahaan	30	60	
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	% penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN	9,70%	100%	Dinas Sosnakertrans
				Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	% Penyediaan sarana prasarana pencegahan dini dan penanggulangan bencana	0	76,49	BPBD
					Kel./Desa siaga bencana (%)	-	9,94	BPBD